

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BELEKE KECAMATAN
GERUNG LOMBOK BARAT 2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh :

BUYUNG PRIMANANDA

NIM 217130052

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BELEKE KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT 2020**



Disusun dan diajukan oleh:

BUYUNG PRIMANANDA
NIM. 217130052

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Mataram 9 Agustus 2021

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP. M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BELEKE KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT 2020**



Disusun dan diajukan oleh:

BUYUNG PRIMANANDA
NIM. 217130052

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 12 Agustus 2021 di nyatakan
telah memenuhi persyaratan
Meyetujui

Tim Penguji

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si** (PU)  (.....)
NIDN. 0825038303
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** (PP)  (.....)
NIDN. 0816057902
3. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si** (PN) (.....)
NIDN. 0806066801

**Mengetahui Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

**Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Buyung primananda

Nim : 217130052

Judul skripsi : Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa untuk
Pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung
Lombok Barat 2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di universitas muhamadiyah mataram maupun di perguruan tinggi lain)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dengan jelas dicantumkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram , 9 september 2021



Buyung Primananda

NIM 217130052



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Buyung PRIMANANDA
NIM : 217130052
Tempat/Tgl Lahir : Beloka 13 Maret 1999
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : PiPPOL
No. Hp/Email : 083 142 793 194

Judul Penelitian : -

Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa
untuk Pembangunan dan Peningkatan Desa
Beloka Kecamatan Gerung Lombok Barat
2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Penulis



BUYUNG PRIMANANDA

NIM. 217130052

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt_perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUYUNG PRIMANANDA
NIM : 217130052
Tempat/Tgl Lahir : BELEKA 13 MARET 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 083 142 793 194 / BUYUNG.PRIMANANDA@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Akuntabilitas perencanaan anggaran dana Dpsa untuk
penyusunan infrastruktur Dpsa BELEKA
kecamatan Gunung Lombok BARAT 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Penulis



BUYUNG PRIMANANDA
NIM. 217130052

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Proses adalah sebuah jawaban dari kemampuan kita. Tetap tersenyum dan
selalu bahagia
(penulis)**



PERSEMBAHAN

- ✦ skripsi ini aku persembahkan untuk dua orang tua tercinta “ SAGIR DAN FAIZAH” yang telah banyak perjuangan dan berkorban demi menjadikan anaknya Sarjana.
- ✦ Skripsi ini pula aku persembahkan untuk keluarga, sahabat dan teman yang telah mendukung selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis khatukan atas limpahan rahmat dan karunia yang telah di berikan oleh allah swt. Sehingga skripsi ini yang berjudul “**Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020**” dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah penulis tentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari dukungan serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga saran dan kritik sangat diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Kritikan bisa disampaikan langsung pada penulis melalui akun gmail. Buyung.primananda@gmail.com Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali. M.SI. selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisial Dan Ilmu Politik Universitas Muhhammadiyah Mataram

3. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP., M.IP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram sekaligus dosen pembimbing kedua.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma.S.IP.,M.SI Selaku dosen pembimbing pertama
5. Dosen di lingkup fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram
6. Dan yang paling istimewa ucapkan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang
tua saya.

Mataram, 9 Agustus 2021

Buyung Primananda

NIM. 217130052

**AKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BELEKE KECAMATAN
GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT 2020**

Oleh:

Buyung Primananda

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa untuk pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung dan penelitian ini dilakukan karna adanya permasalahan di Desa Beleke Kecamatan Gerung dalam pertanggungjawaban perencanaan anggaran. Penelitian dilakukan di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat 2020 dengan jumlah informan delapan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan wawancara dan dokumentasi . teknis analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas perencanaan desa sudah tidak baik lagi karna masih lemahnya pertanggungjawaban untuk memantau perkembangan yang terjadi pada saat pembangunan infrastuktur itu di laksanakan maupun sudah di laksanakan.

Kata kunci : Akuntabilitas, Perencanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur.

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND BUDGET PLANNING FOR THE
DEVELOPMENT OF BELEKE VILLAGE INFRASTRUCTURE, GERUNG
DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY 2020**

By:

Buyung Primananda

Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University, Mataram

ABSTRACT

This study was carried out in Beleke Local, Gerung District, to establish accountability for village budget planning for infrastructure development. Due to budget planning accountability issues in Beleke Village, Gerung District, this study was done. Eight informants were interviewed in Beleke Village, Gerung District, West Lombok Regency 2020. Field observations, interviews, and documentation were used to gather data. The data in this study were subjected to a qualitative technical examination. The findings suggest that village planning accountability has deteriorated since there is still a lack of accountability for monitoring developments throughout infrastructure development.

Keywords: Accountability, Infrastructure Development Budget Planning.



DAFTAR ISI

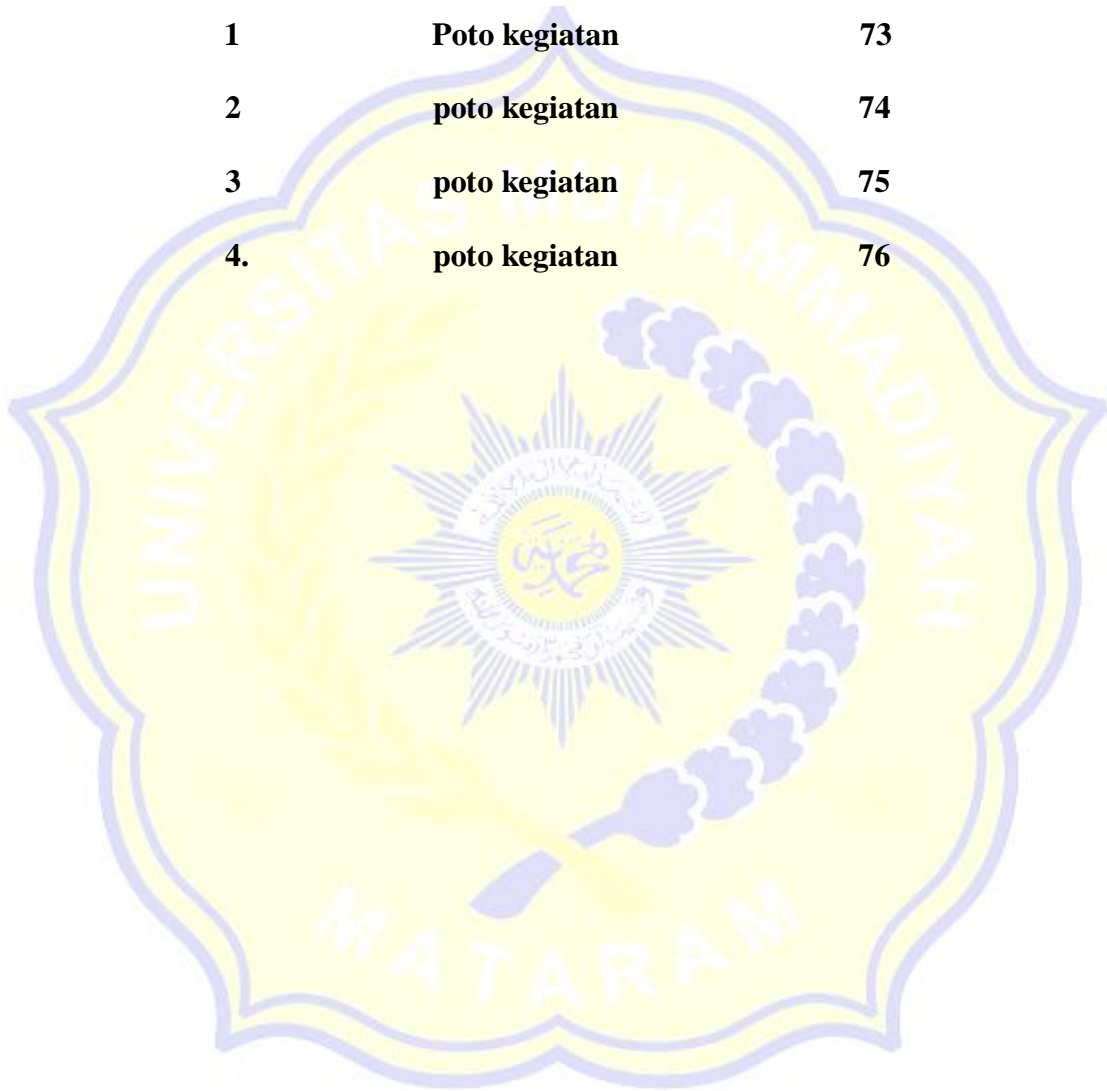
| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2 Akuntabilitas Kebijakan Publik..... | 15 |
| 2.3 Anggaran | 23 |
| 2.4 Perencanaan..... | 24 |
| 2.4.1 Kareteristik perencanaan | 24 |
| 2.4.2 Fungsi Perencanaan..... | 28 |
| 2.4.3 Tujuan perencanaan..... | 28 |
| 2.5 Jenis-Jenis Perencanaan..... | 29 |
| 2.6 Kerangka Berfikir | 31 |
| 2.7 Definisi konseptual..... | 33 |
| 2.8 Definisi opranional | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Jenis penelitian | 35 |
| 3.2 lokasi dan waktu penelitian | 36 |
| 3.3 Teknik penetapan narasumber..... | 36 |
| 3.4 Sumber Data | 37 |
| 3.5 Teknik pengumpulan data | 40 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| 4.1.1 Asal-usul/legenda Desa | 44 |
| 4.1.2 Geografi Desa | 46 |
| 4.1.3 Demografi desa..... | 48 |
| 4.1.4 Keadaan Sosial | 50 |
| 4.1.5 Keadaan Ekonomi..... | 53 |
| 4.2.2 Kondisi Pemerintah Desa | 56 |
| 4.2.1 Pembagian Wilayah Desa..... | 56 |
| 4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa..... | 56 |
| 4.2.3 Struktur Organisasi..... | 59 |
| 4.2 Akuntabilitas Perencanaan Anggaran Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020... | 60 |
| 4.3 Trasparansi Perencanaan Anggaran Pemerintah Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020 | 64 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 78 |
| 5.2 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul | halaman |
|-----|---------------|---------|
| 1 | Poto kegiatan | 73 |
| 2 | poto kegiatan | 74 |
| 3 | poto kegiatan | 75 |
| 4. | poto kegiatan | 76 |



DAFTAR TABEL

| No. | Judul | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | Hasil penelitian terdahulu | 9 |
| 2. | Kerangka berfikir penelitian | 3 |
| 3. | Definisi oprasional | 33 |
| 4. | Narasumber penelitian | 35 |
| 5. | Unit analisa data skunder | 37 |
| 6. | Nama Kepala Desa Beleke tahun ke tahun | 43 |
| 7. | Jumlah KK yang ada di Desa Beleke | 44 |
| 8. | Adapun geografis Desa Beleke penggunaan lahan | 46 |
| 9. | Pendidikan Formal | 48 |
| 10. | Pendidikan Non Formal | 49 |
| 11. | Jumlah pengguran | 50 |
| 12. | Realisasi APBDesa 2020 Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dan proses politik yang berjalan simultan, yaitu desentralisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana,2003:5).

Menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan diantara lembaga lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintah oleh birokrasi menjadi pemerintah oleh partai (*party government*).

Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyaranakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Pembangunan Desa dilakukan dalam rangka pembangunan yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan termasuk di Desa, terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dengan aparatnya di daerah dinas-dinas pemerintah daerah sesuai dengan pokok dan tanggung jawab masing masing. Selanjutnya pembangunan desa dikerahkan untuk meletakkan dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat, dimana Kesa/Kelurahan merupakan landasan Ekonomi Sosial, Budaya, Politik, keamanan dan landasan Nasional .

Perencanaan adalah suatu penentuan urutan tindakan pikiran biaya serta penggunaan waktu dan tenaga untuk satu kegiatan yang didasarkan atas data data dengan memperhatikan skala prioritas yang wajar dan efisien untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sehingga komponen komponen harus dipadukan secara tepat dan serasi agar terhindar dari timbulnya pemborosan yang meliputi tenaga, bahan, waktu dan biaya.

Akuntabilitas perencanaan anggaran desa menjadi tolak ukur sukses apa tidak nya suatu desa kerna disanalah semua perencanaan anggarannya terlebih lagi Desa Beleke Kecamatan Gerung tempat saya tinggal fakta yang terjadi juga ada nya patologi ditengah tengah masyarakat yang masih belum semua bertanggung jawabkan apa yang telah di sepakati bersama diakibatkan masyarakat berkubu kubu dan kurangnya partisipasi masyarakat ke Desa. Pemuda yang ada di Desa Beleke juga stagnan cenderung menurun kepedulian nya terhadap desa nya

sendiri sehingga saat perencanaan anggaran dibahas agak sedikit yang hadir dan perwakilan dari pemuda itu kurang disana hanya melibatkan aparatur Desa itu sendiri. Kurang nya pihak Desa juga jarang mensosialisasikan program program unggulan nya minsalnya rabat jalan dan infrastruktur lainnya memakan banyak biaya namun kurang pertanggungjawaban nya sehingga ketika sudah dlaksanakan rabat jalan dibiarkan tidak dipantau lagi kenapa sampai cepat berlubang jalan yang kemarin dirabat akhirnya dirabat ulang yang rusak dan bagai mana dan mengakibatkan rabat ulang lagi di tempat yang sama memakan biaya lagi.

Bahkan cenderung anggaran dana desa di Desa beleke ini defisit pada tahun yang lalu ini Infrastruktur yang dibangun juga tidak terlalu mewah lampu penerangan jalan tidak semua merata itulah knapa saya sangat tertarik untuk membahas akuntabilitas perancangan anggaran dana desa di Desa Beleke ini karna disanalah harus adanya akuntabilitas dan perencanaan anggaran dana desa nya harus benar matang tentu memperhatikan prosedur prosedur yang ada dan mendengarkan keluhan keluhan masing masing dusun yang ada di Desa itu sendiri

Dalam melaksanakan perencanaan anggaran Desa, sering dijumpai timbul nya masalah kurang nya partisipasi masyarakat dan peran pemuda di Desa Beleke itu sangat kurang juga aparatur yang ada di setiap dusun itu hanya memikirkan ego masing masing yang tentu menyebabkan pemerataan kurang berjalan pada saat anggaran sudah di sepakati bersama. Masalah Justru

adanya permasalahan menyebabkan timbulnya kegagalan kegagalan dari suatu pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik asas asas pengelolaan keuangan Desa sebagai mana tertuang dalam permendagri nomer 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kejadian ini perlu diatasi untuk menghindari akibat akibat negatif yang tidak mendukung berkembang nya partisipasi positif masyarakat di Desa Beleke Kecamatan Gerung itu sendiri oleh karna itu peran pemerintah Desa sangat dibutuhkan sekali ditengah masyarakat yang masih awam dan cenderung ingin mendapatkan hasil dengan cara instan tanpa melalui proses sebagai mestinya dan peraturan yang sudah ditentukan.

Undang undang nomer 6 tahun 2014 dalam undang undang ini dimaksud dengan Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan mengurus uruusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakersa masyarakat , hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintah Negara republik Indonesia

Seluruh Desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), juli 2014 mendatang. Setiap Desa saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh indonesia, akan memperoleh anggaran bekisaran Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar perdesa. Pengucuran anggaran akan berbeda untuk setiap Desa karna disesuaikan dengan luas Desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di Desa tersebut.

Setiap Desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber dana. Dana transfer (dari APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun kemudian alokasi dana Desa di kabupaten. jadi setiap desa mendapatkan lebih dari 1 miliar setiap tahun. Transfer dana tersebut hanya untuk desa. Sementara terkait kelurahan termasuk dalam penerima asal nya, kerna kelurahan masuk struktur pemerintah.

Pola pembangunan yang sekarang ini dikembangkan di Desa yakni pembangunan partidipatif merupakan pola pembangunan yang lama di lakukan bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan dan mayoritas masyarakat Desa sudah

menjadikan hal tersebut budaya seperti gotongroyong, kerja bakti serta tanggung jawab namun pola yang dikembangkan ini merupakan penyempurnaan dari bentuk sebelumnya dengan lebih terpadu, terencana dan sistematis.

Berbagai program seperti yang sifatnya penanggulangan kemiskinan bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan fisik dan segala yang pernah ada, sering berupa untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktor utama namun realitas nya sebagian besar pelaksanaan nya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses pembelajaran dan keaktifan bagi masyarakat serta hasil yang di peroleh berupa terangkatnya permasalahan dan potensi masyarakat secara murni seringkali tidak muncul dalam konteks tersebut

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan anggaran dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok barat tahun 2020

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga manfaat yaitu, teoritis, praktis dan akademik sebagai berikut

A. Manfaat Toritis

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang sama Hasil penelitian ini sebagai sarana pembimbing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan didalam politik. Dan juga utama dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana Desa.

B. Manfaat praktis

Peneliti ini bisa dijadikan salah satu bahan acuan bagi pihak desa yang berkaitan dengan akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa. Dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi berkaitan dengan akuntabilitas perencanaan.

C. Manfaat akademilk

Secara akademik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan mendapatkan gelar strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori-teori yang digunakan untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan pada penelitian ini. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil penelitian terdahulu

| | Peneliti/ Tahun | Judul | Metode Penelitian | Hasil | Relevansi |
|---|--|--|----------------------|---|--|
| 1 | Sitiainul Widha, Djoo Supatmoko, Taufik Kurrohman. 2017 | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa- Desa | Kualitatif | tabilitas dalam perencanaan telah berlangsung dengan memuaskan ,sesuai dengan peraturan perundang | Penelitian ini memiliki relevansi dengan judul peneliti yang berupa judul berapa |

| | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------|---|---|
| | | <i>Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi</i> | | <i>undangan yang berlaku.</i> | <i>metode yang kita gunakan juga teori tentang akuntabilitas.</i> |
| <i>2</i> | <i>Deti kuma lasari, ikhsan budi riharjo .2016</i> | <i>Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.</i> | <i>Kualitatif deskriptif</i> | <i>Pemerintah desa bomo kecamatan regojampi kabupaten banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.</i> | <i>Relevansi dengan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis ialah tentang akuntabilitas dan juga metode penelitian yang dia gunakan</i> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 3 | Puteri ainur rohma a roma ntis .2014 | Akuntabilitas pengelolaa n alokasi dana desa di kecamatan penarukan kabupaten situbondo tahun 2014 | Analisis deskriptif kualitatif | Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan alokasi dana desa ADD baik secara maupun administrasi sudah baik namun harus mendapat atau di berikan bimbingan dari pemerintah kecamatan | Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada judul dan juga metode yang digunakan dalam penelitian. |
| 4 | Agus subro to. Tahu n | Akuntabilitas pengelola an dana desa di studi | Kualitatif | Perencanaan dan pelaksanaa nya kegiatan kegiatan alokasi dana desa, | Relevansinya metode penelitian ini dengan |

| | | | | |
|-------------|---|---|--|---|
| <p>2008</p> | <p><i>kasus pengelolaan dana desa di desa desadalam wilayah kecamatan tlogmulyo kabupaten tamanggung tahun 2008</i></p> |  | <p><i>sudah menempatkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat dari hasil fisik sudah menampakan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, namun di sisi administrasi masih perlu pembinaan lebih</i></p> | <p><i>yang di angkat oleh penulis judul , metode penelitian da juga beberapa teori.</i></p> |
|-------------|---|---|--|---|

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | <p>lanjut karna belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.</p> | |
| 5 | <p>Lina naseh atun nafid ah, Nur anisa .2017</p> | <p>akuntabilitas pengelolaa n keuangan desa di kabupaten jombang</p> | <p>Deskriptif kualitatif</p> | <p>dasarkan peraturan bupati nomer 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas selain itu masih di perlukan adanya pendampingan desa dari</p> | <p>Relevansi penelitian ini memiliki judul atau penelitian yang di lakukan penulis dan juga dalam metode penelitian yang digunakan</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p><i>pemerintah daerah yang instensif dalam membantu desa untuk menghujutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</i></p> | . |
|--|--|--|--|--|---|

Setelah penulis mendapatkan referensi dari para penelitian terdahulu yang dilihat mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang diangkat dan sesuai didalam penulisan proposal diantaranya yang pernah dilakukan yaitu:

Pertama , Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. 2017 dengan judul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa(ADD) di Desa-Desa kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan telah berlangsung dengan memuaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.penelitian memiliki relevansi dengan judul penelitian yang berupa judul beberapa metode yang kita gunakan teori tentang akuntabilitas.

Kedua, Deti Kumalasari, iksan Budi Riharjo. 2016 dengan judul transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. jenis penelitian yang dipakai Kualitatif Deskriptif dan hasil penelitian pemerintah Desa Bomo kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Relevansi dengan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis ialah tentang akuntabilitas dan juga metode nya ialah tentang akuntabilitas dan juga metode penelitian yang di gunakan

Ketiga, Puteri ainurrohma romantis.2014 dengan judul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa kecamatan penarukan kabupaten sitobondo metode yang digunakan analisa Deskriptif Kualitatif dan hasil nya system akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan menerapkan prinsip transparansi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan alokasi dana Desa ADD baik secara maupun administrasi bimbingan pemerintah

Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada judul dan juga metode yang di gunakan dalam penelitian.

Ke Empat, Agus Subroto, Tahun 2008 dengan judul akuntabilitas pengelolaan dana dana Desa di studi kasus pengelolaan dana Desa di Desa dalam wilayah kecamatan tlogmulyo kabupaten tamanggung tahun 2008

metode penelitian yang di pakai kualitatif hasil nya perencanaan dan pelaksanaan nya kegiatan kegiatan alokasi dana Desa, sudah menempatkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparansi sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat dari hasil fisik sudah menampakan adanya pengelolaan yang akuntabilitas tranparan namun disisi dengan ketentuan yang ada.

Ke Lima Lina nasehatun nafidah, Nuranisa, 2017 dengan judul pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang jenis penelitian yang digunakan Kualitatif hasil nya peraturan bupati nomer 33 tahun 2015 pengelolaan keuangan desa secara garis secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas pendampingan desa dari pemerintah daerah yang instensif dalam membantu desa untuk menghujutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan Relevansinya penelitian ini memiliki judul atau penelitian yang di lakukan penulis dan juga dalam penelitian yang di gunakan.

2.2 Akuntabilitas Kebijakan Publik

Menurut Bastian (2010:385) akuntabilitas publik adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara preodik.

Menurut Bowen,2020 akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting yaitu:

1. Alat control kerja demokrasi sebagai mana kita tahu Negara Indonesia menganut sisitem demokrasi. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. menekan alat penyalahgunaan wewenang / tindakan korupsi menurut Robert klitgaard kekuasaan / kewenangan cenderung mengarah pada korupsi hal inilah yang tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak harta dengan cara instan tapi juga di dukung oleh adanya cacat sisitem yang bias di manfaatkan.
3. meningkatkan efesiensi efektifitas suatu proses yang efesien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi atau instansi pemerintahan. Sebuah system yang efesien tidak bias begitu saja di ciptakan , namun pasti begitu saja diciptakan, namun pasti melalui proses bertahap dan evaluasi terus menerus dinilah pentingnya akuntabilitas. Ada nya akuntabilitas juga di gunakan pemenang kepentingan untuk mengetahui titik titik mana saja yang belum efesien , apa masalah nya dan bagaimana fokus pemecahan masalah yang perlu di cari.

Sjahuruddin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi dalam konteks institusi pemerintah.

J.B gharthey (1998) menanyakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pernyataan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan

Ledvina V, Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangan. Setiap orang harus benar benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan tetapi ia harus menyadari bahwa tindakannya akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.

Menurut Mursyudi (2013), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara teoritik.

Meneurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan

hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Perinsip dan Dimensi Akuntabilitas menurut LAN dan BPKP (2000) prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat meminjam penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
4. Harus berorientasi pada perencanaan visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Menurut muhamadi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity dan legality) akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam berkerja dan mentaati ketentuan hukum berkerja dan mentaati ketentuan hokum yang berlaku penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas.
2. Akuntabilitas manajerial(managerial accountability) akuntabilitas manejerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien akuntabilitas kinerja (performance accountability). Infisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klayen atau costumernya.
3. Akuntabilitas program (program accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga lembaga yang harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanann program. Dengan kata lain akuntabilitas program. Dengan kata lain akuntabilitas berarti bahwa

program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bertemu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terakit dengan pertanggungjawaban lembaga publikatas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasaranya pemangku kepentingan dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

4. Akuntabilitas finansial (financial accountability)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik untuk menggunakan uang publik (money public)secara ekonomi, efesien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karna pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik

Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut mahmudi(2013) Akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability). Akuntabilitas vertical adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, minsalnya

akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau walikota menteri presiden, kepala unit kepala kepala cabang CEO, dan sebagian nya.

2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada public secara luas atau terhadap sesame lembaga lainya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Menurut wasistiono (2007) berdasarkan persfektifnya akuntabilitas di bagi menjadi lima jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas administrati/organisasi. Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahanya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal.akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikatakan dengan proses legislative dan yudikatif bentuknya dapat berupa pininjauan kembali kebijakan yang telah di ambil oleh pejabat public maupun pembatalan sesuatu peraturan olehi nstitusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas politik. Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan proritas perdistribution sumber sumber dan menjamin adanya kepatuhan m

4. Pelaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinanyakan oleh administrasi publik.
5. Akuntabilitas professional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkantolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
6. Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang /badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Menurut Raba (2006), akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis,yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik untuk menjamin dijalankan jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan
2. Akuntabilitas proses yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis

akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program, akuntabilitas yang terkait dengan pengembangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.3. Anggaran

Menurut Nafarin (2007:11) Menyatakan bahwa Anggaran adalah suatu rencana kualitatif (satuan jumlah)periodic yang di susun berdasarkan program yang telah disahkan, anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang di nyatakan dalam suatu ruang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Menurut Bahiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2002:18) didalam praktik penganggaran di berbagai Negara dan dunia bisnis, model penanggaran telah dikembangkan sesuai kebutuhan , situasi, dan kondisi. Beberapa jenis model anggaran telah di kembangkan seperti berikut :

1. Line Item Budgeting

Model ini merupakan bentuk bentuk anggaran yang lama sehingga di kenal dengan tradisional budgeting. Organisasi bisnis maupun seckor publik pada umum nya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran kerna modal ini relative mudah dan sederhana.

2. Incremental Budgeting

Penganggaran dengan modal ini pada dasarnya menggunakan line item budgeting, tetapidilakukan dengan menambahkan nilai anggarannya dari tahun sebelum nya , serta motode ini sangat konservatif dengan adanya perubahan yang relative kecil atau dengan batas tertentu berdasarkan pertimbangan yang memindai akan tetapi kelemahan nya memungkinkan adanya pendapatan dan pengeluaran yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

3. Planning Programing Budgeting Sisitem

Model PPBS di kembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model model manajemen keuangan yang ada, didalam model mamagement keuangan yang ada didalam

model ini digunakan cost and benefit analysis. Unit penganggaran mencakup wilayah program yang luas ekonomi, kesehatan, pendidikan dengan pelaksana yang berlainan keunggulan nya komperatif pelaksana yang berlebihan keunggulan nya komperhensif pelaksana program dapat bersaing sedangkan kelemahan nya tidak ada prioritas yang jelas, dan porsi anggaran yang ideal untuk tiap unit satuan sulit diketahui.

4. Pormance Budgetin

Dengan modal anggaran di susun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan.akan tetapi metode ini juga menggunakan klarifikasi berdasarkan objek seperti line item budgeting. Faktor penentu dalam metode ini adalah efesiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya dengan standar biaya tersebut di susun anggaran tahun berikutnya dan bias disesuaikan pertimbanganyang logis serta fokus pada kinerja atau hasil dari program yang di tentukan berdasarkan aspirasi perusahaan.

5. Zero Based Budgeting

Sesuai dengan nama nya anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran, anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang sering kali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif tetapi anggaran nya justru meningkat keunggulan nya memberi kepastian besar

besaran anggaran arah kebijakan lebih jelas sedangkn kelemahannya penutupan prioritas lebih lama dan seriing terjadi *mark up*.

2.4. Perencanaan

Perencanaan menurut Erly Suandy adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikanya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan.

2.4.1 Kareteristik perencanaan

Dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai kareteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen lain. beberapa kareteristik dari manajemen itu adalah:

1. Fungsi manajerial

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga yang paling dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari mamajemen yakni kepegawean , pengarahan perorganisasian dan juga pengadilan, karna di dalam nya di lakukan ruang lingkup rencana yang di buat.

2. Berorientasi pada tujuan. perencanaan akan lebih fokus ke dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan mengidentifikasi tindakan alternative serta

memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

3. Pervasive. Perencanaan yang harus bias turut adil pada seluruh segmen dan turut hadir pada seluruh level dalam organisasi walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkat department
4. Proses berkelanjutan rencana di buat dalam kurun waktu tertentu seperti satu bulan, satu kuartal, satu tahun, dll setelah kurun waktu tersebut sudah selesai maka di perlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nanti.
5. Proses intelektual perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang didalamnya melibatkan bebrapa logika cera berfikir memperkirakan , serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi.
6. Futuristik dalam suatu proses perencanaan , kita bias mengintip masa depan. Hal ini mencakup memperoyeksikan masa depan melakukan analisa dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif.
7. Pengambilan keputusan
Keputusan bias dibuat terkait dengan pilihan yang bias dipilih harus yang terbaik diantara semua pilihan yang ada, yang didalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan.

2.4.2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan pada dasarnya berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H yakni sebagai berikut

1. **What** : apa tujuan yang hendak dicapai desa?
2. **Why** : kenapa hal tersebut menjadi tujuan desa?
3. **When** : kenapakah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut
4. **Who** : siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan desa?
5. **How** : bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencaoai tujuan perusahaan.

2.4.3. Tujuan perencanaan

Setiap desa tentunya mempunyai tujuannya masing masing dan pasti berbeda beda. Tapi pada dasarnya, tujuan desa perencanaan adalah sebagai berikut ini :

1. Demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

2. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non administrator agar bias melakukan tugas nya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.

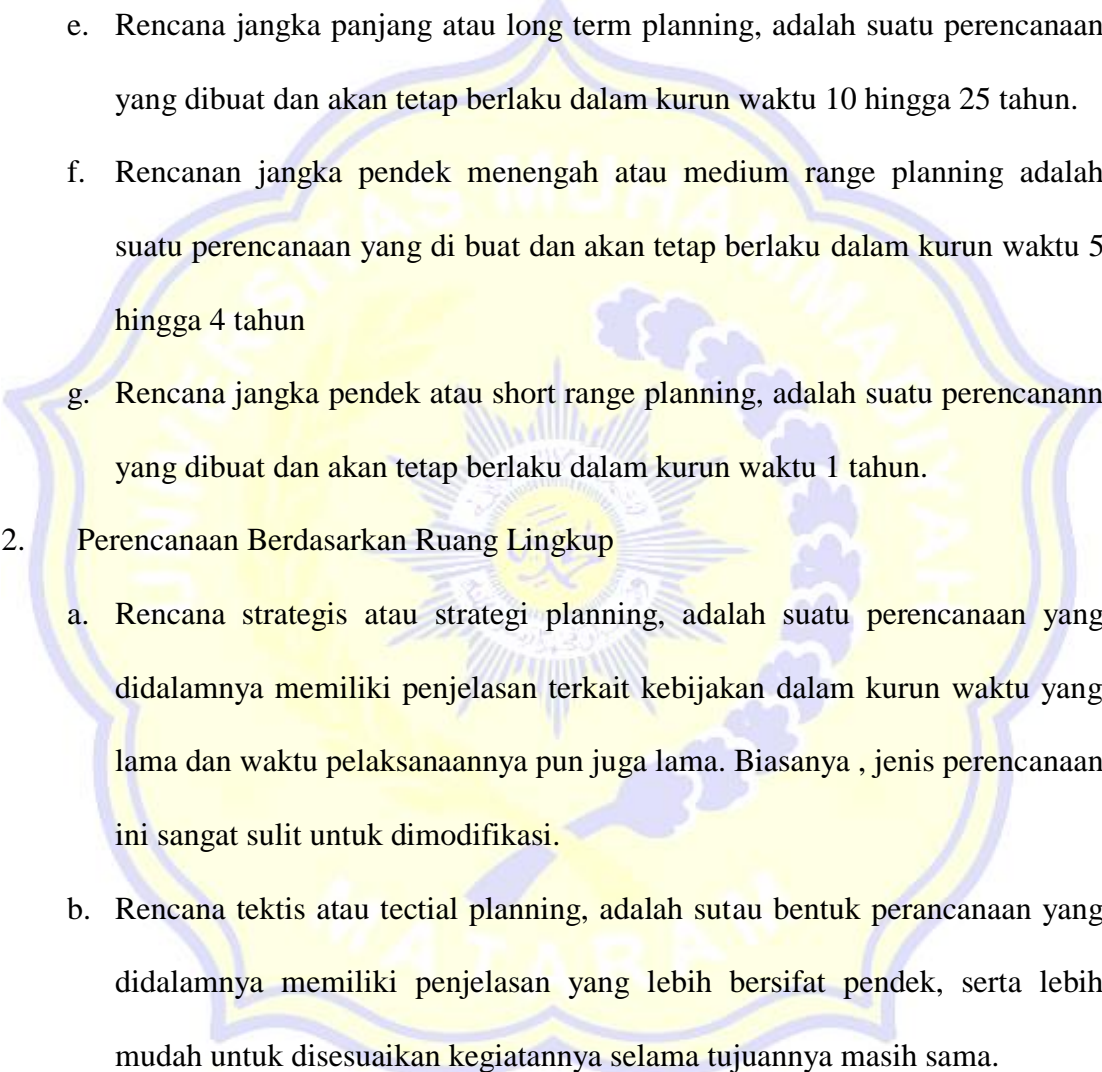
3. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Menentukan suatu standar tertentu nantinya harus bias digunakan dalam berkerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan.

2.5. Jenis-Jenis Perencanaan

Pada umum nya, perencanaan terbagi menjadi tiga, yakni berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan juga berdasarkan ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Perencanaan berdasarkan tingkatan
 - a. Master plan atau rencana induk, adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana didalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang jelas.
 - b. Operational planning atau rencana oprasional, adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan.

- 
- c. Day to day planning atau rencana harian, adalah perencanaan yang lebih berdifat umum rutin.
 - d. Perencanaan berdasarkan jangka waktu
 - e. Rencana jangka panjang atau long term planning, adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun.
 - f. Rencanan jangka pendek menengah atau medium range planning adalah suatu perencanaan yang di buat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun
 - g. Rencana jangka pendek atau short range planning, adalah suatu perencanann yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Perencanaan Berdasarkan Ruang Lingkup
- a. Rencana strategis atau strategi planning, adalah suatu perencanaan yang didalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya , jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi.
 - b. Rencana tektis atau tectial planning, adalah sutau bentuk perancangan yang didalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek, serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama.

- c. Rencana terintegritas atau intergrated planning, adalah suatu bentuk perencanaan yang didalam nya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu.

2.6 . Kerangka Berfikir

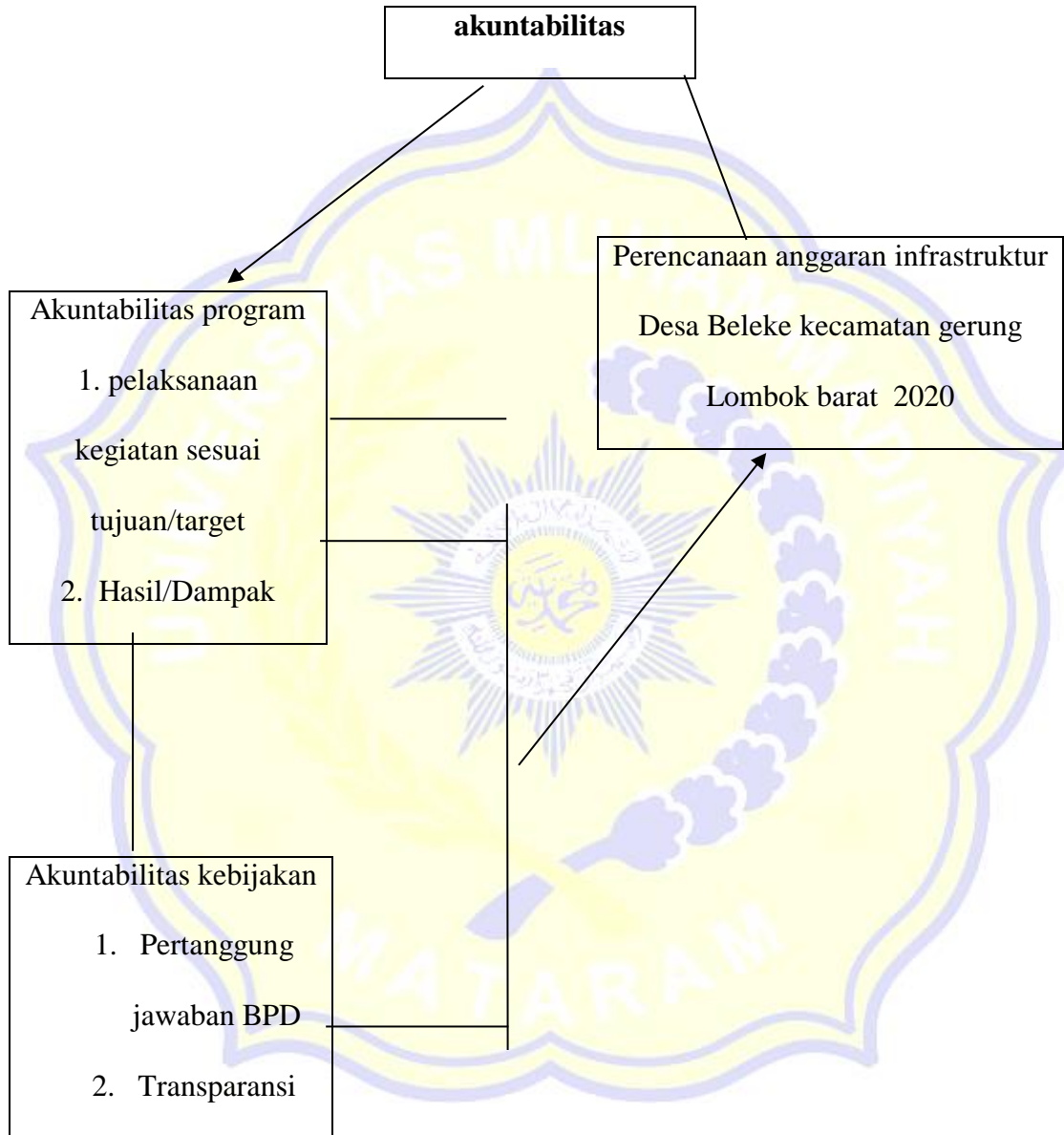
Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian ini maka dibutuhkan satu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang di sorot

Menurut Sugiono (2017:60) memukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagai mana teori berhibungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.1

Kerangka berfikir penelitian



sumber Raba 2006

2.7. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah salah satu pemikiran umum yang berusaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman definisi konseptual juga merupakan penggambaran hubungan konsep konsep khusus yang menentukan variable –variable yang saling berhubungan. Maka definisi konseptual.

1. Akuntabilitas program, akuntabilitas yang terkait dengan pengembangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

2. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.8. Definisi opranional

Definisi oprasional adlah standar ukur atau indikator penelitian untuk mengaitkan arti pada suatu konstruk atau variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variable itu.

Dengan demikian defiinisi oprasional dapat dirumuskan sebagai ukuran dan indikator dari suatu variable untuk dijadikan pijakan dalam membagas hipotesis yang dicari kebenaran nya.

Gambar 2.2

Definisi oprasional

| No | Variabel | Indikator |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Akuntabilitas program | 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target |
| 2 | Akuntabilitas kebijakan | 1. Pertanggung jawaban ke BPD 2. Transparansi |

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

Definisi metode penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan.

Jenis temuan temuan nya tidak diperoleh melalui prosedur prosedur statistik atau bentuk hitungan lain nya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Di lakukan dalam situasi yang wajar metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang di teliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah.

3.2. lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dikabupaten Lombok barat berdasarkan dengan judul yang di angkat oleh peneliti yang berkaitan tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa di Desa beleke kecamatan gerung Lombok barat 2020, Adapun waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu mulai dari juli 2021 sampai Agustus 2021.

3.3. Teknik penetapan narasumber

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *peposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiono; 2019). Yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah para informan yang mengetahui dan sapat membrikan jawaban atas rumusan masalah yang mengetahui dan dapat membrikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini atau data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang akuntabilitas perencanaan anggaran dana desa di Desa Beleke Kecamatan Gerung Lombok Barat 2020. Informen yang dimaksud atau narasumber yang dimaksud ialah orang dari Desa yang bersangkutan , kepala desa, sekdes juga stap desa lain nya dan masyarakat yang menjadi penerima kebijakan penilai kebijakan pemerintah desa itu sendiri

Tabel 2.3

Narasumber penelitian

| No | Narasumber | Jumlah |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1 | Kepala desa | 1 |
| 2 | Ketua BPD | 1 |
| 3 | Staf desa | 4 |
| 4 | Tokoh masyarakat | 4 |
| 5 | Kepala dusun | 4 |
| Jumlah | | 14 |

3.4 Sumber Data

Puhantara. (2020:79) Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting karna sumber data akan menyangkut kualitas hasil olh kerennya sumber data menjadi pertimbangan dalam penentuan metode

1. Data primer adalah

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitain , dalam hal ini peneliti mmeproleh data atau informasi langsung menggunakan instrument-instrument yang telah didapatkan

Tabel 2.4
Unit analisa data primer

| No | Variable | Indicator | Jenis data | Narasumber |
|----|-------------------------|---|---|---|
| 1 | Akuntabilitas program | 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak | 1. Bagaimana Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak | 1. Kepala desa 2. Ketua BPD 3. Staf Desa 4. Tokoh masyarakat 5. .Kepala dusun |
| 2 | Akuntabilitas kebijakan | 1. Pertanggung jawaban BPD 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur | 1. Bagaimana Pertanggung jawaban BPD 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur | 1. Kepala desa 2. Ketua BPD 3. Staf Desa 4. Tokoh masyarakat 5. .Kepala dusun |

2 Data skunder

(Moehar, 2002:113) Data skunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sbagai statistik atau data yang sudah diolah semakin rupa sehingga siapapun rupa sehingga siap

digunakan dalam statistik biasanya tersedia di kantor-kantor birikrasi pemerintahan, biro jasa data perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data

Tabel 2.5

Unit analisa data skunder

| No | Variable | Indicator | Jenis data | Sumber data |
|-----------|-------------------------|---|---|--|
| 1 | Akuntabilitas program | 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan/target 2. Hasil atau dampak | 1. Dokumen Musrembangdes 2. APBDes 3. Realisasi anggaran | 1. Kantor desa 2. Kantor desa 3. Kantor desa |
| 2 | Akuntabilitas kebijakan | 1. Pertanggung jawaban kepada BPD 2. 2. transparansi pelaksanaan program infrastruktur | 1. Dokumen laporan kegiatan pembangunan infrasturktur 2. Papan pengumuman anggaran | 1. Kantor desa 2. Kantor desa |

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Obserpasi

Menurut kortono dalam taufikurahman (2017: 38), obserpasi adalah studi yang disengajakan dalam sistematis tentang fenomena sosial dalam gejala gejala piskis dengan cara pengamatan dan pencitraan, selanjutnya dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri ciri dan luasnya signifikan dari interelasinya elmen elmen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola pola kultur tertentu.

b. Wawancara

Menurut afifudin (2012: 131), teknik wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menayakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informen atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara dengan tanya jawab secara langsung. Teknik wawancara digunakan bertujuan untuk mendapatkan data dari informen dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur yang telah dirumuskan peneliti dan yang akan dilakukan kepada informen atau nara sumber yang mengetahui dan dapat memberikan

informasi atas rumusan masalah dalam penelitian ini tentang akuntabilitas perencanaan dana desa. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dalam afifudin (2012: 131), metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi melalui pencarian dan penemuan data yang berasal dari non-manusia.

Sumber data berupa dokumentasi sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan atau melengkapi memperkuat sumber data yang ada.

(Haris, 2012 dengan studi dokumentasi mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mencari dokumen atau data yang berkaitan dengan fokus peneliti ,baik data yang didapatkan berupa laporan tertulis ataupun laporan tidak tertulis dan juga data yang dapat dari media yang ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono dan taufikrohman (2017:42), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu.pada saat wawancara,peneliti sudah melakukan analisis terhadapjawaban yang di wawancarai, bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pernyataan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel,

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang sudah jenuh (miles dan huberman dalam taufikurahman, 2017:42)

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti mereangkum, memilih hal hal yang pokok,fokus pada hal hal yang penting, dicari tema pada polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan membrikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data dapet dilakukan dalam bentuk tabel grafik. Phie chatd,pictogram, dan sejeniskan. Melalui penyajian tersebut maka data terorganisasikan,tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antara katagori, flowchard dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah penerikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan pada tahap awal didukung oleh bukti bukti yang valid dan konstisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupak kesimpulan yang kredibel.

